

Implementasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Kesejahteraan Lanjut Usia Di Dinas Sosial Kota Bengkulu

Anwar Hamid

Study Program of Administration Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu

Email: ¹⁾ anwarhamid2020@gmail.com ;

ARTICLE HISTORY

Received [29 Desember 2021]

Revised [18 Januari 2022]

Accepted [25 Januari 2022]

KEYWORDS

Lansia, Kesejahteraan,
Peraturan Daerah

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Metode yang digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Informan yang di pilih berjumlah 17 orang dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan aspek dari Perda pasal 29 sampai 36 dan teori Grindle yaitu isi kebijakan (kepentingan yang dipengaruhi, tipe manfaat, derajat perubahan, letak pengambilan keputusan, pelaksana program dan sumber daya yang terlibat) dan konteks implementasi (kekuasaan kepentingan dan strategi aktor, karakteristik lembaga, kepatuhan dan daya tanggap) Hasil penelitian dalam upaya peningkatan kesejahteraan Lansia oleh Dinas Sosial di Kota Bengkulu, berdasarkan aspek Lansia dikelompokkan menjadi Lansia potensial dan tidak potensial yang tidak mampu. Pemberian bantuan memberikan manfaat yang dirasakan oleh Lansia belum optimal karena masih banyak yang belum merasakan manfaat program yang dibuat. Sehingga Derajat perubahan belum optimal karena angka peningkatan Lansia setiap tahun bertambah. Pelaksana program dan sumberdaya yang ada belum optimal karena masih ada ditemui permasalahan dari pelaksana program. Konteks Kebijakan berdasarkan Perda mengenai koordinasi dan Kelembagaan sudah cukup baik dari segi kekuasaan kepentingan dan strategi aktor serta karakteristik lembaga. Daya tanggap dan kepatuhan masyarakat masih belum optimal karena kurangnya sosialisasi.

ABSTRACT

The method used is a descriptive qualitative research approach. The results of the study in an effort to improve the well-being of the Elderly by the Social Service in the City of Bengkulu, the elderly are grouped into two parts, namely the potential elderly and incapable non-potential elderly. The provision of assistance consisted of providing productive economic assistance (UEP) for the elderly given to 30 potentially disadvantaged Lansia in the city of Bengkulu and assistance from the elderly social assistance (ASLUT) given to 105 elderly people in Bengkulu City and elderly care given to 50 elderly people managed by Charity Noble LKS is given to non-potential elderly people who cannot afford it. The improvement of the welfare of the elderly has not been proven optimally, the data collection for the elderly has not been evenly distributed, the assistance that has not been able to meet the needs of the elderly.

PENDAHULUAN

Pemerintah membuat kebijakan atau memberikan bantuan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik di tingkat nasional maupun daerah demi terciptanya kehidupan yang layak. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah juga meliputi kebijakan untuk kaum lanjut usia atau biasadisebut dengan Lansia. Sesuai dengan amanat pembukaan Undang Undang Dasar 1945 pada alinea ke empat yang mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan tertuang dalam Pancasila sila ke lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Untuk mencapai tujuan dari kebijakan yang disusun pemerintah, maka kebijakan tersebut akan diimplementasikan. Dimana menurut Lane dalam (Aminudin 2017:65), implementasi sebagai konsep dapat dibagi ke dalam dua bagian. Pertama, *implementation (intention, output, outcome)*. Implementasi merupakan fungsi yang terdiri dari maksud dan tujuan, hasil sebagai produk dan hasil dari akibat. Kedua, *implementation (policy, formator, implementator, initiator, time)*. Penekanan utama kedua fungsi ini adalah kebijakan itu sendiri, kemudian hasil yang dicapai dan dilaksanakan oleh implemen tator dalam kurun waktu tertentu. Implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasi dengan hasil kegiatan pemerintah. Akan tetapi pada kenyataannyadiketahui bahwa betapapun baiknya rencana atau tujuan dari kebijakan yang telah dibuat tidak ada gunanya apabila kebijakan tersebut tidak dilaksanakan atau direalisasikan dengan baik dan benar. Sehingga untuk mengatasi masalah tentang kesejahteraan Lansia perlu adanya pelaksanaan.

Dalam upaya peningkatan kesejahteraan kaum Lansia maka dibentuklah Undang-Undang No. 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia, dan Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia. Undang-Undang No. 13 tahun 1998 menjelaskan bahwa masyarakat yang dikategorikan sebagai penduduk Lansia adalah masyarakat yang berusia 60 tahun lebih. Dalam upaya menyejahterakan kaum Lansia, diharapkan agar Lansia tetap dapat diberdayakan sehingga berperan dalam kegiatan pembangunan dengan memperhatikan fungsi kearifan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, pengalaman, usia, dan kondisi fisiknya, serta terselenggaranya pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial Lansia.

Persentase Lansia yang kian meningkat setiap tahunnya berimplikasi tidak hanya pada kehidupan Lansia semata, akan tetapi memberikan dampak terhadap kehidupan generasi lainnya. Mereka yang berada pada kelompok usia produktif (15-59 tahun) ikut menanggung kehidupan para Lansia yang sudah tidak berkontribusi aktif secara ekonomi. Hal ini tergambar melalui rasio ketergantungan Lansia yang persentasenya cenderung merangkak naik setiap tahunnya seiring dengan meningkatnya persentase Lansia. Pada tahun 2017, rasio ketergantungan Lansia cenderung mengalami peningkatan selama satu windu terakhir menjadi 14,02 persen yang artinya bahwa setiap 100 orang penduduk usia produktif harus menanggung sekitar 14 orang Lansia. Tingginya angka ketergantungan menyebabkan sulitnya keluarga memenuhi kebutuhan rumah tangga, keluarga tidak mampu menyisihkan uang bagi pengembangan sumber daya manusia dan bagi peningkatan kualitas hidup.

Kota Bengkulu merupakan salah satu kota yang sadar akan pentingnya peningkatan kesejahteraan kaum Lansia. Karena setiap tahun angka Lansia terus meningkat dan perlu penanganan khusus maka pemerintah Kota Bengkulu membuat suatu kebijakan tentang Kesejahteraan Lansia yang disusun dalam suatu Peraturan Daerah No 04 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Kesejahteraan Lanjut Usia. Melalui Perda ini pemerintah berharap kemudahan akses pelayanan di bidang keagamaan, kesehatan, kemudahan untuk memperoleh dan menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas umum bagi Lansia, tidak ada lagi Lansia yang terlantar, Lansia yang tidak potensial akan diberdayakan dan Lansia potensial akan diberikan bantuan usaha

LANDASAN TEORI

Kebijakan Publik

Budiardjo (1972) dalam (Ali, 2011:11) mengungkapkan dalam kebijakan akan ditemukan sejumlah keputusan, dan setiap keputusan berada dalam proses pengambilan keputusan. Ketika sejumlah keputusan dikumpulkan maka hal itu akan terwujud sebagai suatu kebijakan. Menurut Dunn (1981) dalam (Ali, 2011:13) menyebutkan bahwa kebijakan adalah hubungan dari unit pemerintahan dengan lingkungannya dan kebijakan adalah apapun yang hendak pemerintah lakukan atau tidak dilakukan.

Demikian juga halnya menurut Anderson dalam (Suparno, 2017:7) kebijakan adalah *"a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern"*. Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku guna memecahkan masalah tertentu.

Merujuk penjelasan di atas Anderson dalam (Suparno, 2017:7) mengatakan *"public policies are those developed by governmental bodies and official"* yang artinya kebijakan publik adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan badan dan pejabat pemerintah. Selanjutnya, menurut Anderson implikasi dari pengertian kebijakan publik adalah :

- a. Bahwa kebijakan publik itu selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan.
- b. Bahwa kebijakan itu berisi tindakan atau pola tindakan pejabat pemerintah.
- c. Bahwa kebijakan itu adalah merupakan apa yang benar benar dilakukan oleh pemerintah, jadi bukan apa yang pemerintah bermaksud akan melakukan sesuatu atau menyatakan melakukan sesuatu.
- d. Bahwa kebijakan negara bisa bersifat positif dalam arti merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.
- e. Bahwa kebijakan pemerintah didasarkan atau selalu dilandaskan pada peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa.

Dari berbagai pengertian di atas, peneliti dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan yang mempunyai rangkaian konsep, asas dan strategi yang dibuat oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu dan mengatasi masalah publik

Perda No 04 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Kesejahteraan Lanjut Usia

Upaya peningkatan kesejahteraan Lansia tertuang pada Perda Lansia No. 04 tahun 2016 pasal 8 yang meliputi: Pelayanan keagamaan dan mental spiritual, pelayanan kesehatan, pelayanan kesempatan

kerja, pelayanan pendidikan dan pelatihan, pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam pengurusan administrasi pemerintahan dan penggunaan fasilitas umum, pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum, bantuan sosial dan perlindungan sosial.

Dalam penelitian ini, peneliti hanya memilih fokus pada pasal 8 ayat g yaitu bantuan sosial karena jumlah penyandang masalah kesejahteraan Lansia yang ter data oleh Dinsos masih banyak dan cenderung mengalami kenaikan setiap tahunnya. Dinsos sebagai salah satu Dinas yang menjadi pelaksana Perda Lansia hanya menjalankan Perda Lansia pada pasal 8 ayat g yaitu bantuan sosial. Program bantuan sosial dalam Perda Lansia diatur dalam pasal 28 sampai pasal 36 yaitu berkaitan dengan bantuan sosial untuk Lansia Potensial yang tidak mampu yang terdiri dari penjelasan mengenai jenis bantuan, pada pasal 29 menjelaskan tentang tujuan pemberian bantuan, pasal 30 menjelaskan mengenai peran pelaksana program dalam menentukan penerima bantuan harus sesuai dengan keahlian keterampilan, minat dan bakat Lansia. Selain itu juga pada pasal 30-33 menjelaskan tentang pemberian bantuan kepada Lansia tidak potensial yang tidak mampu dan kriteria dalam memberikan bantuan kepada Lansia tidak potensial yang tidak mampu. Pada pasal 34-35 menjelaskan tentang kelembagaan dan koordinasi dalam melaksanakan Perda Lansia.

Penelitian ini menggunakan aspek yang diambil dari Perda yaitu sasaran pemberian bantuan, tujuan pemberian bantuan, pelaksana program, kelembagaan dan koordinasi. Dari aspek tersebut peneliti juga menggabungkan antara Perda dengan teori implementasi dari Grindley yaitu isi kebijakan dan konteks kebijakan. Sehingga dengan demikian melalui penelitian ini dapat diketahui seperti apa upaya peningkatan kesejahteraan Lansia di Kota Bengkulu khususnya yang dilakukan oleh Dinsos Kota Bengkulu

Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir dari penelitian ini dimulai dari pemikiran peneliti dan keingintahuan peneliti mengenai Lansia di Kota Bengkulu secara mendalam. Dimana yang ingin diketahui oleh peneliti adalah masalah peningkatan Lansia di Indonesia setiap tahunnya dan upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan Lansia kurang mampu yang terus mengalami kenaikan. Kemudian kebijakan dari masalah Lansia diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bengkulu No 04 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Kesejahteraan Lanjut Usia. Kebijakan yang sudah di putuskan oleh pemerintah akan ditelaah lebih mendalam lagi mengenai seperti apakah implementasi Perda tersebut. Selanjutnya berangkat dari keingintahuan peneliti mengenai implementasi Perda khususnya pada pasal 8 (1) huruf g yaitu bantuan sosial. Peneliti membahas mengenai paragraf 1 dan 2 pada Perda No 04 tahun 2016 yaitu bantuan sosial bagi Lansia potensial dan Lansia tidak potensial yang tidak mampu karena point yang peneliti pilih lebih berkenaan dengan masalah yang ingin ditelaah dan diteliti oleh peneliti lebih dalam lagi selain itu peneliti juga melihat dari fenomena masalah yang ada bahwa jumlah Lansia yang terlantar atau tidak potensial yang tidak mampu di Indonesia masih cukup besar yaitu sebanyak 2.1 juta jiwa dan berpotensi tidak potensial sebanyak 1,8 juta jiwa dari 21,7 juta jiwa Lansia di Indonesia pada tahun 2017 dan di Kota Bengkulu jumlah Lansia yang ter data oleh Dinas Sosial Kota Bengkulu sebagai penyandang masalah kesejahteraan pada tahun 2017 sebanyak 452 Lansia. Pada penelitian mengenai implementasi perda tentang Lansia peneliti menggunakan model implementasi menurut Grindle, karena model implementasi Grindle menjelaskan bahwa dalam tahapan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks kebijakan

METODE PENELITIAN

Metode Analisis

Pendekatan Kualitatif menurut Creswell (2014:4) merupakan metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data. Strategi yang akan dilakukan pada penelitian yang akan dilakukan adalah kualitatif studi kasus. Kualitatif studi kasus merupakan strategi penelitian dimana di dalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses atau sekelompok individu. Kasus kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan (Creswell, 2014:19-20).

Fokus dan Aspek Penelitian

Penetapan fokus penelitian dimaksudkan agar memperjelas ruang lingkup penelitian pembahasan penelitian, sehingga terhindar dari pengumpulan data-data pada bidang yang terlalu umum dan luas. penelitian yang akan dilakukan dimaksudkan untuk melihat dan mengetahui mengapa Implementasi Perda

Kota Bengkulu No 04 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Kesejahteraan Lanjut Usia khususnya pada pasal 8 ayat 1 poin g tentang bantuan sosial belum optimal.

Dari Perda tersebut untuk mendapatkan informasi mengenai implementasi perlindungan sosial dan kesejahteraan Lansia, peneliti memilih aspek berdasarkan Perda Lansia di bagian bantuan sosial pasal 28 sampai pasal 36 dengan menghubungkan teori implementasi dari Grindle, dimana dalam keberhasilan implementasi menurut Grindle dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks kebijakan. Karena teori implementasi dari Grindle yang peneliti pilih lebih berkenaan dengan masalah yang ingin ditelaah dan diteliti oleh peneliti lebih dalam lagi seperti kepentingan yang dipengaruhi dari kebijakan perda Lansia, tipe manfaat yang akan diterima oleh Lansia, derajat perubahan yang dirasakan oleh Lansia sebelum dan sesudah menerima bantuan, siapa pelaksana program dan sumber daya yang terlibat dalam pengambilan keputusan mengenai Lansia. Selain itu peneliti juga ingin mengetahui karakteristik, strategi dan daya tanggap lembaga atau dinas terkait yang melaksanakan kebijakan. Selain itu peneliti juga melihat dari fenomena masalah yang ada bahwa jumlah Lansia yang terlantar atau tidak potensial yang tidak mampu di Indonesia masih cukup besar yaitu sebanyak 2.1 juta jiwa dan berpotensi tidak potensial sebanyak 1,8 juta jiwa dari 21,7 juta jiwa Lansia di Indonesia pada tahun 2017 dan di Kota Bengkulu jumlah Lansia yang terdata oleh Dinas Sosial Kota Bengkulu yang terdata sebagai penyandang masalah kesejahteraan pada tahun 2017 sebanyak 452 Lansia

Lokus/Tempat Penelitian

Lokasi Penelitian akan dilakukan di Dinas Sosial Kota Bengkulu. Penentuan lokasi penelitian dilakukan dengan cara menentukan lembaga yang menjadi penyelenggara perlindungan sosial dan kesejahteraan sosial bagi Lansia. Dinas Sosial Kota Bengkulu merupakan unit yang bertanggung jawab dalam menangani permasalahan kesejahteraan Lansia dalam hal pemberian bantuan sosial.

Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian yang akan dilakukan ini adalah data primer dan data sekunder dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi dan audio visual.

1. Observasi

Observasi menurut Creswell (2014:267) merupakan kegiatan yang di dalamnya peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu individu di lokasi penelitian. Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan secara langsung dengan mendatangi rumah rumah Lansia yang merupakan penerima bantuan dan mendatangi Lansia yang masih ada di jalan di lingkungan Kota Bengkulu. Selain itu peneliti juga merekam/mencatat baik dengan cara terstruktur atau semi struktur (misalnya, dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang ingin diketahui oleh peneliti).

2. Wawancara

Menurut Creswell (2014:267) wawancara dapat dilakukan dengan cara *face to face interview* dengan partisipan, mewawancarai dengan telepon, atau terlibat dalam *focus group interview* yang terdiri dari 6 sampai 8 orang per kelompok. Wawancara seperti itu memerlukan pertanyaan yang secara umum tidak terstruktur dan bersifat terbuka yang dirancang untuk memunculkan pandangan dan opini dari partisipan. Dalam penelitian yang akan dilakukan peneliti melakukan wawancara dengan cara *face to face interview* dengan partisipan dan memberikan pertanyaan terbuka kepada informan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yang dimaksud adalah dokumentasi berupa makalah, koran, *diary* peneliti, buku harian, *e-mail* dan surat menyurat (Creswell, 2014:270). Pada penelitian ini peneliti melakukan dokumentasi mengenai surat menyurat berkaitan dengan penelitian dan mengambil berita dari surat berita *online* yang berkaitan dengan penelitian.

4. Audio-Visual

Data penelitian kualitatif juga berupa foto, objek objek seni, *videotape*, atau segala jenis suara/bunyi (Creswell, 2014:270). Pada penelitian yang peneliti lakukan, peneliti mengambil foto dan merekam pada saat melakukan observasi dan wawancara

Informan Penelitian

Informan memiliki peran yang penting dalam penelitian ini yaitu sebagai pemberi data yang memberikan informasi data primer dan sekunder. Dalam penelitian yang akan dilakukan peneliti memilih informan sesuai dengan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti serta melihat kemampuan yang dimiliki oleh informan terkait masalah yang akan di kaji.

Penelitian yang akan dilakukan ini dalam memilih informan peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik penentuan informan dengan mempertimbangkan kemampuan informan untuk memberikan data yang akurat dan lengkap.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti didapatkan berdasarkan data-data yang diperoleh langsung dari lapangan dari tanggal 5 Januari – 25 Januari 2019 dengan melalui proses teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi secara langsung dan mengambil dokumentasi yang mendukung penelitian. Hasil yang didapat merupakan penjelasan yang menyajikan mengenai keterangan-keterangan yang ditemukan di lapangan selama penelitian. Data-data yang berhasil peneliti kumpulkan tersebut diharapkan dapat memberikan penjelasan yang sesuai mengenai implementasi Perda No 04 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Kesejahteraan Lanjut Usia khususnya pada pasal 8 ayat 1 huruf g yaitu bantuan sosial yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Bengkulu.

Karakteristik Informan

Informan penelitian merupakan sumber data yang digunakan pada penelitian ini. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu memilih informan yang mengetahui informasi yang peneliti butuhkan, karena informan yang dipilih dalam kesehariannya berkaitan dengan permasalahan yang peneliti teliti pada tahun 2018. Adapun jumlah informan dalam penelitian ini berjumlah 17 orang.

peneliti menemukan jawaban bahwa dari Dinas Sosial Kota Bengkulu dalam menentukan penerima bantuan mereka memilih calon penerima yang telah memiliki usaha, bantuan yang diberikan bersifat untuk pengembangan usaha bukan untuk membuat usaha baru. Dinas Sosial juga tidak memberikan pelatihan atau pembinaan kepada Lansia penerima bantuan, Dinas Sosial hanya memberikan pendampingan kepada Lansia penerima bantuan dalam hal penggunaan dana bantuan yang diberikan

Peneliti melakukan wawancara kepada para Lansia penerima bantuan mengenai apakah mereka bekerja sesuai dengan keahlian mereka atau tidak. Peneliti menemukan bahwa dalam pemberian bantuan UEP bagi Lansia, Dinas Sosial memilih penerima bantuan yang sudah memiliki usaha, jadi bantuan yang diberikan tidak melakukan pembinaan atau pelatihan. Dinas Sosial dalam pemberian bantuan hanya melakukan pengarahan mengenai penggunaan dana bantuan. Dari informan peneliti juga menemukan fakta bahwa para lansia yang bekerja ada sebagian yang melakukan pekerjaannya tidak sesuai dengan keahlian, namun para Lansia terpaksa melakukannya karena tidak ada pekerjaan lain yang bisa dikerjakan. Dari hasil wawancara dan observasi peneliti menemukan bahwa dari bantuan yang diberikan belum menunjukkan perubahan karena tidak adanya bimbingan atau pelatihan, sehingga para penerima bantuan tidak mengalami perubahan atau peningkatan dalam hal produksi dan peningkatan keahlian. Selain itu pemberian bantuan juga diberikan kepada Lansia yang telah memiliki usaha bukan para Lansia yang tidak mempunyai usaha. terkadang tidak dilibatkan dalam pendataan penduduk termasuk Lansia, karena kebanyakan dinas memiliki orang tersendiri untuk langsung melakukan pendataan kelapangan dengan berpedoman pada data dari BPS.

Berkaitan dengan pendataan para Lansia, peneliti menanyakan kepada para Lansia bagaimana cara Dinsos melakukan pendataan. Semua memberikan jawaban yang sama yaitu, para Lansia sebelumnya tidak tau akan mendapatkan bantuan (para Lansia tidak pernah mengusulkan kepada Dinas Sosial ataupun ke Kelurahan), saat para pegawai Dinas Sosial dalam hal ini pendamping mendatangi para Lansia, pendamping mengatakan kepada Lansia bahwa para Lansia akan menerima bantuan modal usaha. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, peneliti menemukan bahwa Dinas Sosial tidak melakukan koordinasi kepada pihak kelurahan sehingga penerima bantuan tidak sesuai dengan yang di harapkan karena tidak menggunakan data yang ada di Kelurahan. Pelaksana program dalam suatu kebijakan sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu kebijakan, pelaksana program menjadi tolak ukur sejauh mana program diimplementasikan. Untuk mengetahui siapa yang menjadi pelaksana program dari bantuan UEP Lansia peneliti melakukan wawancara kepada informan yang terkait dalam program UEP Lansia.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada keluarga Lansia mengenai ke mana para Keluarga akan pergi ketika ingin meminta bantuan, IH mengatakan bahwa IH ketika meminta bantuan mengenai Lansia, IH akan mendatangi Dinsos. Dari hasil penelitian, peneliti menemukan bahwa kepatuhan dan daya tanggap pelaksana program menurut Dinsos sudah baik, meskipun masih ada beberapa kekurangan namun masih bisa dimaklumi. Selain itu peneliti menemukan bahwa dari sisi masyarakat, masyarakat dalam hal ini keluarga atau Lansia belum mengetahui dinas dinas yang menangani masalah Lansia sehingga para keluargadan Lansia ketika mendapatkan masalah mereka akan pergi ke Dinsos.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan kepada Lansia potensial, tidak potensial yang mendapatkan bantuan tanggapan Para Lansia dan Keluarga Lansia mengenai upaya pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan Lansia masih dinilai kurang karena bantuan yang diberikan kepada Lansia belum mampu meningkatkan kesejahteraan hidup Lansia serta untuk pemenuhan kebutuhan hidup para Lansia, masih sangat bergantung kepada keluarga. Selain dari bantuan yang

diberikan belum mampu memenuhi kebutuhan Lansia, peran para pendamping juga di rasa kurang optimal karena masih banyak Lansia yang mengungkapkan bahwa pendamping jarang melakukan kunjungan kepada Lansia.

Pembahasan

Dari pemaparan hasil penelitian diatas, peneliti membahasnya berdasarkan jenis Lansia yang dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kota Bengkulu No 04 tahun 2016 tentang perlindungan dan kesejahteraan lanjut yaitu Lansia potensial tidak mampu dan Lansia tidak potensial tidak mampu dengan menggunakan aspek dari model implementasi Grindle yaitu isi kebijakan dan konteks implementasi.

Lansia Potensial Tidak Mampu

Dalam Perda No 04 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Kesejahteraan Lansia menjelaskan mengenai pemberian bantuan sosial bagi Lansia potensial yang tidak mampu yaitu KUBE dan UEP, namun yang baru berjalan di Kota Bengkulu hanya UEP Lansia. Bantuan tersebut berupa bantuan modal usaha sebesar RP. 2.000.000 untuk 30 orang penerima bantuan. Untuk melihat dan mengetahui apakah program UEP Lansia berjalan dengan baik, maka peneliti akan membahas hasil penelitian berdasarkan aspek model implementasi dari Grindle yaitu isi kebijakan Menurut Grindle (Suparno, 2017:24) Implementasi kebijakan merupakan upaya yang harus dilakukan agar tujuan kebijakan dapat dicapai secara maksimal dan efisien. Agar tujuan tersebut dapat tercapai, tujuan tersebut dijabarkan dalam program aksi dan berbagai kegiatan. Program aksi atau jenis bantuan yang diberikan kepada Lansia potensial yang tidak mampu berdasarkan Perda No 04 tahun 2016 pada pasal 31 yaitu usaha ekonomi produktif (UEP) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Usaha ekonomi produktif merupakan jenis bantuan modal usaha yang diberikan kepada setiap Lansia yang memenuhi syarat untuk melakukan usaha sendiri dengan tujuan agar Lansia dapat memenuhi kebutuhannya dalam meningkatkan taraf kesehateraan. Sedangkan kelompok usaha bersama merupakan jenis bantuan yang diberikan kepada lansia berupa bantuan modal usaha yang kemudian dikelola oleh sekelompok Lansia yang telah memenuhi syarat. Namun dalam pelaksanaannya bantuan yang diberikan kepada Lansia pada tahun 2018 hanya UEP, Karena menurut TY pegawai Dinas Sosial Kota Bengkulu pemberian bantuan yang dianggarkan oleh pemerintah hanya UEP, selain itu Dinsos juga tidak mengajukan program KUBE dikarenakan terdapat hambatan karena jenis bantuan ini berupa kelompok usaha bersama maka akan sulit untuk membentuk KUBE karena sulit mengumpulkan Lansia yang membentuk usaha bersama.

Dari hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan, diketahui bahwa tingkat perubahan kesejahteraan Lansia dengan adanya bantuan UEP Lansia masih dikatakan belum menunjukkan hal yang positif karena beberapa hal seperti pertama, pemberian bantuan diberikan kepada para Lansia yang telah memiliki usaha sehingga tidak mengurangi jumlah Lansia yang tidak bekerja, selain tidak mengurangi jumlah Lansia yang tidak bekerja dari pelaksanaannya juga tidak diberikan pelatihan atau pendampingan kepada para Lansia sehingga para Lansia penerima bantuan hanya memperoleh bantuan modal usaha namun tidak diberikan bekal untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam berusaha. Sehingga berdasarkan wawancara dan observasi yang peneliti lakukan peneliti masih menemukan ada Lansia yang bekerja namun tidak sesuai dengan keahlian mereka sehingga dalam mengerjakan pekerjaannya masih sangat bergantung kepada orang lain, dan juga usaha yang Lansia jalankan tidak adanya inovasi, seperti penjual gorengan yang peneliti temui pada saat penelitian Lansia tersebut hanya menjual bakwan dan pisang goreng karena Lansia tersebut hanya bisa membuat bakwan dan pisang goreng. Seharusnya jika pihak Dinsos memberikan pelatihan maka Lansia tersebut dapat mengembangkannya yang akan berdampak positif pada apa yang Lansia jual bisa lebih berkembang. Yang kedua dalam pemanfaatan bantuan modal usaha, masih ada para Lansia yang menggunakan bantuan tersebut tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian bantuan. Ada Lansia yang memanfaatkan bantuan dengan hal lain dikarenakan ada kepentingan yang harus didahulukan dari pada mengembangkan usahanya. Seperti IN yang menggunakan bantuan UEP untuk membayar listrik rumahnya sehingga IN tidak bisa mengembangkan usaha yang dimiliki.

Sumber daya yang dilibatkan dalam hal ini peneliti memfokuskan pada kualitas sumber daya manusia yang melaksanakan program UEP Lansia. Dalam pelaksanaan program UEP Lansia kualitas SDM sangat berpengaruh dalam menentukan keberhasilan kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, peneliti menarik kesimpulan bahwa kualitas SDM yang ada di Dinsos saat ini belum menunjukkan kualitas yang baik hal tersebut diketahui dari jumlah uang yang diterima oleh Lansia yaitu sebesar RP. 1.950.000 yang seharusnya Lansia menerima bantuan sebesar RP. 2.000.000. Dari ketidaksesuaian jumlah uang yang diterima oleh Lansia menunjukkan bahwa pendamping dan Dinsos masih melakukan pungutan yang seharusnya tidak dilakukan oleh Dinsos. Dengan adanya pungutan RP. 50.000 untuk setiap penerima bantuan menunjukkan kualitas SDM yang ada di Dinsos masih belum menunjukkan pelaksanaan program yang akuntabilitas dan jujur. Mengenai ketepatan alokasi dana yang tidak sesuai Sabatier

mengungkapkan bahwa untuk membuat suatu kebijakan berhasil salahsatu faktornya adalah ketepatan alokasi dana. Dari data diatas dapat diketahui bahwa pelaksana program masih melakukan kecurangan kecurangan dalam melaksanakan tugasnya sebagai pemberi layanan, karena masih terdapat pungutan liar yang dilakukan secara terbuka oleh Dinas Sosial Kota Bengkulu.

Lansia Tidak Potensial dan Tidak Mampu

Dalam Perda No 04 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Kesejahteraan Lansia dijelaskan bahwa Lansia yang menjadi perhatian pemerintah yaitu Lansia tidak potensial yang tidak mampu. Peneliti akan membahas lebih lanjut mengenai pelaksanaan perda tentang Lansia dalam meningkatkan kesejahteraan Lansia tidak potensial dengan menggunakan model implementasi Grindle yaitu isi kebijakan dan konteks implementasi.

Lansia tidak potensial tidak mampu merupakan Lansia yang sudah tidak berdaya, miskin, tidak memiliki kemampuan baik fisik maupun ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup secara layak, dan tidak ada yang mengurus atau bergantung kepada orang lain. Di Kota Bengkulu pada tahun 2018 berdasarkan data dari Dinsos Lansia yang tidak mampu sebanyak 452 orang. Dalam rangka memberikan bantuan kepada Lansia tidak potensial pemerintah Kota Bengkulu melalui Dinsos melaksanakan program ASLUT. Program ASLUT merupakan pemberian bantuan biaya hidup dan pemberian pendampingan sosial kepada Lansia. Di Kota Bengkulu jumlah penerima ASLUT sebanyak 105 orang Lansia, dengan jumlah bantuan yang diterima Lansia sebesar RP. 200.000/bulan.

Peneliti menemukan bahwa kebutuhan Lansia tidak hanya sekedar makan dan minum saja akan tetapi lebih dari itu, Lansia membutuhkan obat obatan, dan juga pendampingan sosial sehingga mereka merasa tidak kesepian. Dalam implementasinya program ASLUT belum mampu memberikan manfaat yang lebih kepada Lansia karena menurut para Lansia dengan bantuan RP. 200.000 setiap bulan belum mampu mencukupi kebutuhannya sehingga mereka masih bergantung kepada keluarga atau kepada tetangga mengharapkan belas kasihan dari masyarakat. Selain dari Lansia hal serupa juga diungkapkan oleh keluarga Lansia yang menyatakan bahwa para Lansia dan keluarga belum terlalu merasakan manfaat dari bantuan yang ada.

Melalui program ASLUT pemerintah mengharapkan adanya pengurangan jumlah angka kemiskinan terutama pada penduduk usia tua atau Lansia. Pemerintah kota mengharapkan tidak ada lagi Lansia tidak potensial yang tidak mampu di Kota Bengkulu. Namun pada pelaksanaannya belum menunjukkan ke arah positif hal tersebut dibuktikan dengan data yang peneliti dapatkan dari Dinsos yang menyatakan bahwa angka Lansia penyandang masalah

kesejahteraan pada tahun 2018 mengalami peningkatan yaitu sebanyak 452 Lansia dari sebelumnya pada tahun 2017 sebanyak 315 orang. Data tersebut menunjukkan bahwa program yang dijalankan oleh pemerintah saat ini belum optimal atau dapat dikatakan tidak berhasil karena peningkatan angka penyandang masalah kesejahteraan Lansia yang mengalami peningkatan. Selain data dari Dinsos peneliti juga melakukan observasi ke rumah Lansia penerima bantuan, di rumah Lansia peneliti menemukan bahwa ada Lansia yang tinggal tidak layak, Lansia hanya tinggal di dalam ruangan kecil dengan kasur yang sudah lapuk, dengan kondisi atap yang tidak menggunakan plafon dan tanpa ada kipas angin di dalam rumah Lansia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil observasi dan penelitian yang peneliti lakukan mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu No 04 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Kesejahteraan Lanjut Usia di Dinas Sosial Kota Bengkulu pada tanggal 5 januari - 25 januari 2019 peneliti menarik kesimpulan bahwa Implementasi Perda tentang Lansia yang dilaksanakan di Dinsos belum optimal karena.

Lansia Potensial Tidak Mampu

1. Sasaran pemberian bantuan sosial dalam pelaksanaan Perda Lansia yaitu Lansia potensial yang tidak mampu.
2. Tujuan pemberian bantuan. Lansia belum merasakan manfaat yang diperoleh dari bantuan UEP Lansia, karena masih ada Lansia yang memanfaatkan bantuan dengan kepentingan lain dan penghasilan Lansia tidak mengalami peningkatan. Pemberian bantuan UEP Lansia belum optimal karena dari pemberian bantuan UEP, Lansia penerima bantuan tidak mengalami perubahan seperti perubahan jenis usaha atau pengembangan usaha, selain itu Lansia yang menerima bantuan juga bukan Lansia yang belum memiliki usaha sehingga jumlah Lansia potensial tidak mampu yang tidak memiliki usaha tidak mengalami perubahan.

3. Pelaksana program dan sumber daya yang dilibatkan. Dari kedua aspek tersebut dapat diketahui bahwa SDM yang menjadi pelaksana program belum melakukan tugasnya dengan baik dikarenakan masih ditemukan pemotongan besaran bantuan dari RP. 2.000.000 para Lansia hanya menerima sebesar RP. 1.950.000. Dan pendamping tidak mencari Lansia yang belum memiliki usaha serta tidak memberikan pelatihan kepada Lansia.
4. Pemberian bantuan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Bengkulu, belum optimal dalam menentukan penerima bantuan berdasarkan keahlian, keterampilan, bakat dan minat Lansia karena masih ada beberapa Lansia yang mengungkapkan bahwa mereka bekerja tidak sesuai dengan keahlian mereka. Selain itu juga penerima bantuan merupakan Lansia yang telah memiliki usaha, bukan Lansia yang belum memiliki usaha kemudian dibina untuk membuat usaha baru.

Lansia Tidak Potensial Tidak Mampu

Jenis bantuan. Dalam perda Lansia berkaitan dengan Lansia tidak potensial tidak mampu yaitu Lansia yang tidak mampu memenuhi kebutuhan sendiri, sehingga bergantung pada orang lain. Manfaat dari program ASLUT belum mampu memenuhi kebutuhan Lansia yang semakin banyak. Para Lansia tidak merasakan manfaat dari program ASLUT. Derajat Perubahan yang diharapkan dalam program ASLUT yaitu memenuhi kebutuhan, mendapatkan dampingan sosial dan peningkatan kesejahteraan bagi Lansia belum optimal karena Lansia dan keluarga masih merasakan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan serta kondisi Lansia yang masih tinggal ditempat yang tidak layak. Kriteria dan tata cara pemberian bantuan. Letak dalam program ASLUT yaitu dilaksanakan oleh Kabid Resos dengan Kasi Resos Dinsos. Pelaksana Program dalam program ASLUT masih kurang memadai karena jumlah pendamping yang berjumlah 10 orang dengan jumlah Lansia sebanyak 105 orang, yang menyebabkan pekerjaan yang dilakukan pendamping tidak maksimal karena terlalu banyak Lansia dampingan. Sumber Daya yang di libatkan dalam hal pelaksanaan kebijakan Perda Lansia yaitu SDM yang berkualitas, namun dari hasil penelitian menunjukkan bahwa SDM yang ada di Dinsos belum maksimal dibuktikan dengan tidak melakukan kunjungan ke rumah Lansia sesuai dengan buku pedoman yang telah ditetapkan

Saran

Lansia Potensial Tidak Mampu

- a. Dinas sosial melakukan pendataan secara merata dengan melibatkan kelurahan dan RT/RW
- b. Memberikan bantuan modal usaha kepada Lansia yang potensial namun belum memiliki usaha.
- c. Memberikan pelatihan kepada Lansia potensial tidak mampu

Lansia Tidak Potensial Tidak Mampu

- a. Meningkatkan peran pendamping Lansia.
- b. Menambah kuota penerima bantuan.
- c. Menambah jumlah besaran bantuan

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. (2016). *Dasar Dasar Kebijakan Publik*. Bandung. Alfabeta.
- Ali, Faried & Andi Syamsul. (2011). *Studi Kebijakan Publik*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Aminudin, Achmad & Suratman. (2017). *Pengantar Kebijakan Publik Dalam Perspektif Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi*. Bengkulu: Jurusan Administrasi Publik.
- Creswell, W., John. (2014). *Research Design Pendekatan Kualitatif Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pasolong, Arbani. (2007). *Teori Administrasi publik*. Makasar: CV Alfabeta.
- Suparno. (2017). *Implementasi Kebijakan Publik Dalam Praktek*. Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya.
- Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung. AIPi